



LAPORAN HASIL EVALUASI PASCA PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DISUSUN OLEH

Ni Kadek Erawati, S.STP., M.Si
JF Analis Kebijakan Ahli Muda
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Badung

DIMENSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

A. Struktur dan proses pengambilan keputusan, sebelum dan sesudah penerapan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

Sebelum penyederhanaan birokrasi, proses pengambilan keputusan di perangkat daerah masih panjang dan berjenjang, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh persetujuan. Keputusan lebih banyak tersentralisasi pada pejabat struktural dengan alur disposisi dan paraf berlapis. Setelah kebijakan diterapkan, struktur organisasi menjadi lebih ramping dan fleksibel, dengan pelimpahan kewenangan teknis langsung kepada pejabat fungsional sesuai bidang keahliannya. Proses kini lebih sederhana, berbasis kompetensi, dan mampu mengurangi tumpang tindih kewenangan. Dengan struktur baru ini, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan akuntabel. Akan tetapi dilain sisi, budaya kerja lama yang masih melekat, terdapat pengambilan keputusan masih menunggu persetujuan berjenjang, meskipun secara struktur sudah dirampingkan dikarenakan budaya menunggu jawaban atau petunjuk dari atasan tetap melekat, meski sudah ada pelimpahan kewenangan. Serta pimpinan tidak memberi delegasi yang jelas kepada bawahan (terutama jabatan fungsional) hal ini terjadi karena pimpinan kebingungan siapa yang berwenang mengambil keputusan

B. Pengambilan Keputusan setelah dilakukan Penyederhanaan Birokrasi

Setelah penyederhanaan birokrasi, keputusan dapat diambil jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Alur yang tadinya memerlukan persetujuan berlapis kini dipangkas,

DIMENSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

A. Struktur dan proses pengambilan keputusan, sebelum dan sesudah penerapan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

Sebelum penyederhanaan birokrasi, proses pengambilan keputusan di perangkat daerah masih panjang dan berjenjang, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh persetujuan. Keputusan lebih banyak tersentralisasi pada pejabat struktural dengan alur disposisi dan paraf berlapis. Setelah kebijakan diterapkan, struktur organisasi menjadi lebih ramping dan fleksibel, dengan pelimpahan kewenangan teknis langsung kepada pejabat fungsional sesuai bidang keahliannya. Proses kini lebih sederhana, berbasis kompetensi, dan mampu mengurangi tumpang tindih kewenangan. Dengan struktur baru ini, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan akuntabel. Akan tetapi dilain sisi, budaya kerja lama yang masih melekat, terdapat pengambilan keputusan masih menunggu persetujuan berjenjang, meskipun secara struktur sudah dirampingkan dikarenakan budaya menunggu jawaban atau petunjuk dari atasan tetap melekat, meski sudah ada pelimpahan kewenangan. Serta pimpinan tidak memberi delegasi yang jelas kepada bawahan (terutama jabatan fungsional) hal ini terjadi karena pimpinan kebingungan siapa yang berwenang mengambil keputusan

B. Pengambilan Keputusan setelah dilakukan Penyederhanaan Birokrasi

Setelah penyederhanaan birokrasi, keputusan dapat diambil jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Alur yang tadinya memerlukan persetujuan berlapis kini dipangkas,

DIMENSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

sehingga keputusan administratif yang dulunya membutuhkan beberapa hari dapat diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik, sistem perizinan berbasis daring, serta kewenangan yang diberikan langsung kepada pejabat fungsional menjadikan proses pengambilan keputusan lebih singkat, praktis, dan efisien. Bahkan beberapa layanan kini dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat, hanya hitungan menit, karena otorisasi berada langsung di level pelaksana teknis. Namun percepatan ini kadang mengorbankan kualitas karena tidak semua pejabat fungsional memiliki pengalaman dan kompetensi cukup dalam mengambil keputusan strategis yang kompleks dan membutuhkan pertimbangan mendalam lintas bidang mengakibatkan terhambatnya proses pengambilan keputusan.

C. Kualitas keputusan yang diambil setelah kebijakan Penyederhanaan Birokrasi diterapkan

Kualitas keputusan secara umum meningkat karena pengambilan keputusan kini dilakukan oleh pejabat fungsional yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. Dengan adanya digitalisasi dokumen dan penerapan sistem elektronik, keputusan menjadi lebih transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, proses yang lebih ringkas meminimalkan potensi kesalahan administrasi. Namun, masih terdapat tantangan berupa perlunya penguatan kompetensi bagi sebagian pejabat agar tetap dapat memberikan keputusan yang berkualitas karena tidak semua pejabat pelaksana memiliki kompetensi memadai untuk keputusan strategis, terutama

DIMENSI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

yang membutuhkan pertimbangan komprehensif antar unit dan analisis risiko yang mendalam. Secara keseluruhan, penyederhanaan birokrasi berhasil menghadirkan keputusan yang lebih cepat, berbasis keahlian, dan selaras dengan kebutuhan pelayanan publik.

D. Kolaborasi intra atau antar unit organisasi dalam proses pengambilan keputusan setelah kebijakan Penyederhanaan Birokrasi diterapkan

Penyederhanaan birokrasi membawa dampak positif terhadap kolaborasi, baik di dalam unit maupun antar unit organisasi. Dengan berkurangnya lapisan struktural, koordinasi dapat dilakukan secara lebih langsung dan intensif tanpa menunggu alur disposisi yang panjang. Hal ini memungkinkan bidang-bidang yang berbeda untuk bekerja sama lebih cepat dalam menyelesaikan persoalan dan mengambil keputusan bersama. Penerapan sistem digital juga mendorong keterhubungan antarinstansi, sehingga pengambilan keputusan lintas sektor menjadi lebih efisien. Kolaborasi yang semakin erat ini mendukung peningkatan kualitas keputusan karena melibatkan berbagai perspektif dan keahlian sekaligus. Namun kolaborasi yang terbentuk belum sepenuhnya stabil dan kadang menimbulkan kebingungan peran serta overlap tanggung jawab antar unit kerja yang berdampak pada efektivitas.

A. Percepatan pemberian pelayanan setelah kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

Setelah penyederhanaan birokrasi, pemberian pelayanan mengalami percepatan yang sangat signifikan. Layanan yang dulunya memerlukan waktu beberapa hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam bahkan menit. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi daring, tanda tangan elektronik, dan integrasi layanan membuat masyarakat bisa mendapatkan dokumen lebih cepat tanpa prosedur berbelit. Perubahan ini tidak hanya memangkas waktu tunggu, tetapi juga meningkatkan kepastian dan kepraktisan dalam memperoleh pelayanan publik. Namun percepatan ini belum merata di semua jenis layanan dan masih terkendala, sebab dalam praktiknya jabatan fungsional belum diberi kewenangan dan tanggung jawab yang jelas untuk mengeksekusi layanan, serta belum sepenuhnya diiringi oleh perubahan struktur SOP baru Pelayanan pasca Penyederhanaan Birokrasi sehingga alur layanan menjadi tidak relevan

B. Perubahan dalam kualitas layanan publik yang diberikan setelah kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

Kualitas layanan publik meningkat pesat setelah birokrasi disederhanakan. Proses pelayanan yang lebih ringkas dan digitalisasi membuat layanan lebih transparan, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat tidak lagi terbebani oleh birokrasi berlapis karena keputusan teknis dapat langsung diambil di tingkat pelaksana. Hal ini memberikan dampak nyata berupa

peningkatan kepuasan masyarakat, yang juga diakui melalui berbagai indikator kinerja dan penghargaan tingkat nasional. Akan tetapi dengan struktur baru, banyak pejabat fungsional yang masih belum berkompetensi menjadi ragu dalam mengambil keputusan karena takut salah atau tidak merasa berwenang, sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas layanan publik yang diberikan.

C. Prosedur layanan menjadi lebih sederhana atau lebih kompleks setelah kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

Prosedur layanan menjadi jauh lebih sederhana. Jika sebelumnya masyarakat harus melalui tahapan manual dengan verifikasi berulang, kini cukup melalui prosedur singkat yang sering kali terintegrasi dalam satu layanan. Penerapan layanan terintegrasi, aplikasi digital, serta tanda tangan elektronik membuat masyarakat tidak perlu lagi melewati berbagai meja birokrasi. Penyederhanaan prosedur ini menjadikan pelayanan publik lebih cepat, praktis, dan mudah dipahami. Namun jika hanya struktur yang disederhanakan (misalnya penghapusan eselon) tapi proses layanan masih tetap sama, maka belum ada dampak nyata pada kemudahan layanan.

DIMENSI EFISIENSI BIAYA

- A. Perbandingan biaya operasional dan belanja pegawai, sebelum dan sesudah pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi.**

Dari sisi biaya, penerapan penyederhanaan birokrasi menimbulkan pergeseran. Belanja pegawai cenderung meningkat karena banyak jabatan fungsional yang memiliki kelas jabatan dan tunjangan lebih tinggi dibanding jabatan struktural sebelumnya. Namun, biaya operasional justru menurun karena struktur organisasi yang lebih ramping mengurangi kebutuhan rapat, perjalanan dinas, dan koordinasi berlapis. Dengan demikian, meski belanja pegawai naik, efisiensi tercapai pada aspek operasional, sehingga secara keseluruhan beban anggaran dapat lebih terkendali.

DIMENSI TANTANGAN KEBIJAKAN

A. Tantangan atau kendala utama yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

Salah satu kendala utama adalah ketidaksiapan sumber daya manusia, khususnya dalam memahami peran dan tanggung jawab baru setelah peralihan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Banyak pegawai belum memiliki kompetensi teknis maupun manajerial yang memadai untuk menjalankan fungsi pelayanan secara efektif dalam struktur yang lebih ramping. Selain itu, ketidakjelasan tugas dan kewenangan pejabat fungsional sering menyebabkan kebingungan dalam pengambilan keputusan, sehingga justru memperlambat proses layanan publik. Di sisi lain, reformasi struktural belum selalu diikuti dengan pembaruan sistem dan prosedur kerja, seperti standar operasional prosedur (SOP) dan sistem informasi yang masih menggunakan pendekatan lama. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai, serta budaya birokrasi yang masih hierarkis dan formalistik, turut memperparah kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Akibatnya, alih-alih mempercepat dan menyederhanakan layanan, kebijakan ini dalam beberapa kasus justru menimbulkan kompleksitas baru.

B. Strategi dan langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung untuk menghadapi tantangan atau kendala dalam penerapan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

Perlunya penyusunan ulang SOP dan tupoksi agar selaras dengan struktur baru dan memastikan kejelasan tugas setiap pegawai. Kedua, pelatihan intensif diberikan untuk

DIMENSI TANTANGAN KEBIJAKAN

Salah satu kendala utama adalah ketidaksiapan sumber daya manusia, khususnya dalam memahami peran dan tanggung jawab baru setelah peralihan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Banyak pegawai belum memiliki kompetensi teknis maupun manajerial yang memadai untuk menjalankan fungsi pelayanan secara efektif dalam struktur yang lebih ramping. Selain itu, ketidakjelasan tugas dan kewenangan pejabat fungsional sering menyebabkan kebingungan dalam pengambilan keputusan, sehingga justru memperlambat proses layanan publik. Di sisi lain, reformasi struktural belum selalu diikuti dengan pembaruan sistem dan prosedur kerja, seperti standar operasional prosedur (SOP) dan sistem informasi yang masih menggunakan pendekatan lama. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai, serta budaya birokrasi yang masih hierarkis dan formalistik, turut memperparah kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Akibatnya, alih-alih mempercepat dan menyederhanakan layanan, kebijakan ini dalam beberapa kasus justru menimbulkan kompleksitas baru.

TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut dalam kebijakan Penyederhanaan Birokrasi?

Evaluasi rutin terhadap distribusi beban kerja agar tidak menimbulkan ketimpangan, pengembangan kompetensi jabatan fungsional yang diiringi penguatan sistem jenjang karir fungsional untuk menjaga motivasi pegawai. Diperlukan kejelasan SOP dan pelimpahan kewenangan yang proporsional serta penguatan integrasi layanan antarinstansi. Monitoring berbasis indikator terukur harus diperkuat untuk evaluasi berkelanjutan. Namun implementasi rekomendasi membutuhkan anggaran yang besar dan komitmen jangka panjang yang belum pasti dari pimpinan daerah yang bisa berubah setiap periode.

B. Kelanjutan Penerapan kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi, Penyetaraan Jabatan, dan Penerapan Sistem Kerja

Kebijakan penyederhanaan birokrasi berpotensi besar untuk diterapkan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Struktur yang lebih ramping memungkinkan efisiensi, sementara penguatan jabatan fungsional memastikan keputusan dan pelayanan berbasis kompetensi. Keberlanjutan kebijakan ini sangat bergantung pada peningkatan kapasitas SDM, dukungan regulasi yang jelas, serta infrastruktur teknologi yang stabil. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan pelayanan publik. Jika dijalankan dengan konsisten, penyederhanaan birokrasi dapat menjadi fondasi bagi terciptanya pemerintahan yang adaptif, profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tanpa penguatan kapasitas, penyelarasan sistem, dan komitmen berkelanjutan dari pimpinan, kebijakan ini berisiko tidak optimal dalam jangka panjang.